

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN

DARI KONVERSI LAHAN DI KOTA PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH:

Nama : IKA MUSTHAFA, SH

NIM : 1420112040

Pembimbing : 1. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum

2. Dr. Sukanda Husin, SH, LL.M



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN
DARI KONVERSI LAHAN DI KOTA PADANG**

**(IKA MUSTHAFA, 1420112040, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 121 Halaman)**

ABSTRAK

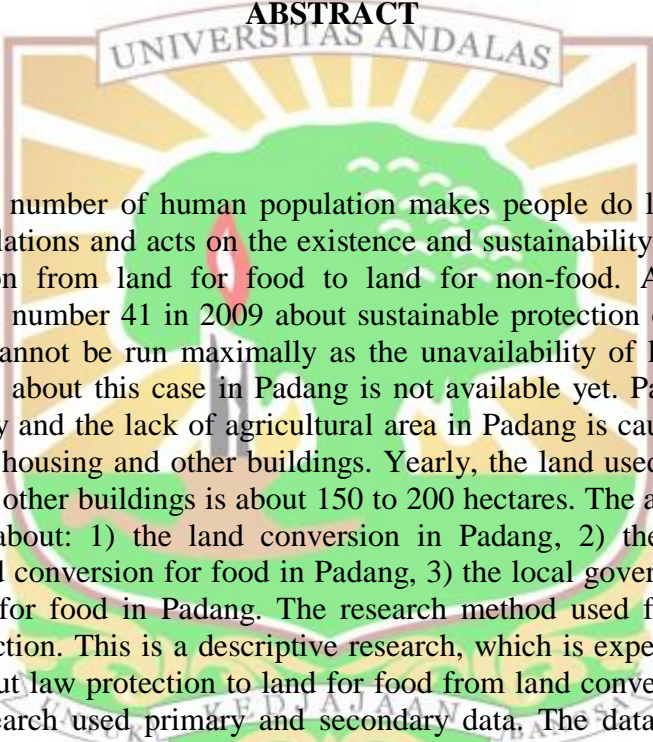
Semakin meningkatnya penambahan penduduk mengakibatkan alih fungsi (konversi) lahan pertanian pangan. Aspek peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan dan keberlanjutan lahan-lahan pertanian saat ini juga tidak mampu membendung terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Seperti yang termuat dalam UU Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak diiringi dengan Peraturan Pemerintah Daerah, karena Kota Padang belum memiliki Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kota Padang memang bukan termasuk sentral pertanian pangan, kurangnya areal persawahan salah satunya disebabkan alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun. Akibat alih fungsi lahan tersebut untuk pembangunan perumahan dan lainnya. Perkiraan Pemkot Padang, setiap tahun penyusutan areal pertanian di daerah itu akibat dari pembangunan kawasan perumahan mencapai 150 hektar sampai 200 hektar. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1). konversi lahan pertanian bisa terjadi di Kota Padang, 2). perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan agar tidak terjadi konversi lahan, 3). kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan dari konversi lahan di Kota Padang. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta data yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). Saat ini lahan produktif yang ada di Kota Padang mengalami perubahan fungsi menjadi lahan permukiman sehingga mengakibatkan semakin minimnya ketersediaan lahan pertanian pangan. Oleh sebab itu, menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan lahan pertanian pangan menjadi pembangunan. 2). Peraturan pemerintah melahirkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan dari konversi lahan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mempertahankan lahan pertanian dari pembangunan, 3). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dilakukannya arah kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat (Negara) yang belum ditunjang secara penuh oleh instrumen/aturan hukum yang menjadi turunan dalam pelaksanaannya di daerah khususnya kota Padang dan dapat dijadikan acuan serta pedoman sehingga dapat terlindungi dan terjaminnya perlindungan secara hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian dan Konversi Lahan

LAW PROTECTION TOWARD AGRICULTURAL LAND FOR FOOD FROM LAND CONVERSION IN PADANG CITY

**(IKA MUSTHAFA, 1420112040, Master of Law Studies, Faculty of Law
University of Andalas, 2017, 121 pages)**

ABSTRACT



The increasing number of human population makes people do land conversion. Available regulations and acts on the existence and sustainability cannot stop the land conversion from land for food to land for non-food. As explained in Indonesian Act number 41 in 2009 about sustainable protection of land for food protection, it cannot be run maximally as the unavailability of local regulation. City regulation about this case in Padang is not available yet. Padang is not the agricultural city and the lack of agricultural area in Padang is caused by the land conversion for housing and other buildings. Yearly, the land used for conversion to housing and other buildings is about 150 to 200 hectares. The aim of this study is to discuss about: 1) the land conversion in Padang, 2) the protection for preventing land conversion for food in Padang, 3) the local government policy to maintain land for food in Padang. The research method used for this research is social jurisdiction. This is a descriptive research, which is expected to describe all aspects about law protection to land for food from land conversion in Padang City. This research used primary and secondary data. The data were collected through interview, document study, and from the qualitative data. From the research, it can be concluded that: 1) currently, land conversion from agricultural to housing and other buildings has happened. It causes the disparity of land for food to housings. 2) The protection to sustainable agricultural land expected by the government is not yet run well by the Local Government of Padang to protect them totally, 3) There is not enough regulation to protect the agricultural land makes it hard to maintain the agricultural land from land conversion.

Keywords: law protection, agricultural land, land protection